



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 September 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA K/L sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP C. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu D. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

I. **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, hari Rabu, 21 September 2022, dibuka pukul 10.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. **POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepala Badan Pembinaan

4

Ideologi Pancasila, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023 sebesar **Rp2.981.302.990.000,- (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp26.100.000.000 (dua puluh enam milyar seratus juta rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp197.007.706.000,-
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp523.515.457.000,-
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp357.480.121.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.903.299.706.000,-
2. Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp1.190.552.014.235,- (satu trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah)**.
3. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp248.508.954.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp205.751.173.000,-
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: Rp42.757.781.000,-
4. Kepala BNPP menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan BNPP sebesar **Rp100.000.000.000,-,- (seratus milyar rupiah)**.
5. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyampaikan Pagu Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2023 sebesar **Rp357.496.465.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh**

lima ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BPIP Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp196.435.510.000,-
 - b. Program Pembinaan Ideologi Pancasila: Rp161.060.955.000,
6. Kepala BPIP menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan BPIP sebesar **Rp33.089.733.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).**

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023 sebesar **Rp2.981.302.990.000,- (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp26.100.000.000 (dua puluh enam milyar seratus juta rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp197.007.706.000,-
 - b. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp523.515.457.000,-
 - c. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp357.480.121.000,-
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.903.299.706.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar **Rp1.190.552.014.235,- (satu trilyun seratus sembilan puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kemendagri tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp248.508.954.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp205.751.173.000,-
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan: Rp42.757.781.000,-
4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BNPP sebesar **Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
5. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2023 sebesar **Rp357.496.465.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BPIP Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp196.435.510.000,-
 - b. Program Pembinaan Ideologi Pancasila: Rp161.060.955.000,-
6. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BPIP sebesar **Rp33.089.733.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BPIP tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.12 WIB.

Jakarta, 21 September 2022

KETUA RAPAT


Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH

A-142